

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari adanya salah pengertian dalam menafsirkan serta untuk menjelaskan maksud judul skripsi maka perlu sekiranya penulis menjelaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

##### **1. Yayasan Ghifari**

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan dengan tujuan yang ideal dalam lapangan keagamaan ilmu pengetahuan sosial dan lain sebagainya, yang tidak mempunyai anggota namun memiliki modal.<sup>1</sup>

Yang tidak memiliki anggota adalah: tidak ada orang/ pihak yang mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh Yayasan. Pengurus, pendiri, pembina bukan anggota karena mereka bekerja tidak mendapatkan keuntungan atau rela tidak digaji. Karyawan bukan merupakan anggota dan karyawan digaji bukan berdasarkan keuntungan yang didapat yayasan sebagaimana layaknya seorang anggota koperasi karyawan. Penerimaan manfaat klien/kelompok dampingan juga bukan merupakan anggota mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pelayanan secara sukarela dari kekayaan yayasan dan fasilitas bantuan yang diterima tidak memikat<sup>2</sup>. Sedangkan Ghifari adalah nama

---

<sup>1</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 110.

<sup>2</sup> Arie Kusumatuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan UU RI no. 16 tahun 2001*, (Indonesia Legal Center Publising, 2003), hlm. 23

dari suatu Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial ekonomi, keagamaan maupun dalam bidang kesejahteraan atau kemasyarakatan yang lain, yang berada di Dusun Ambarukmo, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Jadi berangkat dari pengertian yayasan tersebut diatas Ghifari masuk dalam kategori yayasan, karena memiliki badan hukum, tujuan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan, memiliki modal dan tidak mempunyai anggota.

## 2. Memberdayakan

Secara etimologis memberdayakan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti: berkekuatan, bertenaga, jalan, ikhtiar, ada akal.<sup>3</sup>

Menurut *Marriam Webster* dan *Oxford English Dictionary*. Memberdayakan mengandung arti yaitu: memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Dan mempunyai arti juga upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.<sup>4</sup> Sedangkan dalam skripsi ini memberdayakan adalah upaya untuk memberi kemampuan atau jalan kepada masyarakat miskin agar hidupnya mandiri dan mempunyai *skill* untuk mengembangkan potensinya dalam mengentaskan kemiskinan.

## 3. Masyarakat Miskin

Masyarakat adalah golongan besar dan kecil yang terdiri atas beberapa manusia yang dengan sendirinya saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>5</sup> Pengertian

---

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1970), hlm 233

<sup>4</sup> Onny S. Prijono, “*Organisasi Non-Pemerintah (NGOs) : Peran Dan Pemberdayaannya*”, dalam *buku Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Onny S. Prijono dan Pranaka, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm 3.

<sup>5</sup> Simanhadi W. *Masyarakat Tengger*. (Yogyakarta kanisius, 1994), hlm. 10.

lain, masyarakat berarti: pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu).<sup>6</sup> Sedangkan kata miskin mempunyai arti secara bahasa tidak berharta benda, serta kurang (berpenghasilan sangat rendah).<sup>7</sup>

Dengan demikian, maka yang dimaksud masyarakat miskin adalah sekelompok masyarakat yang hidupnya bersama dengan adanya peraturan tertentu yang tidak mempunyai harta benda atau penghasilannya rendah dan tidak tercukupi kebutuhan hidupnya.

#### 4. Lembah Code

Lembah Code adalah bentang lahan yang memiliki batas administrasi dan geografis tertentu, serta memiliki karakteristik khas kondisi fisik, penduduk, sosial dan ekonomi.<sup>8</sup>

Penduduk lembah Code tersebut terletak dipinggir jembatan sardjito Yogyakarta sisi sebelah selatan. Secara administrasi wilayah lembah Code tersebut adalah kelurahan Kotabaru. Dilihat dari posisi letaknya dapat dikatakan wilayah lembah Code berada ditengah-tengah keramaian kota, karena dekat dengan Tugu dan jalur ke arah Malioboro, pemukiman penduduk ditempati oleh 120 jiwa 30 keluarga dan semuanya adalah warga migran dari berbagai daerah, Bentuk dari usaha lembah Code adalah usaha kelontong, penjual barang bekas, buruh, penjual gorengan.

---

<sup>6</sup> Hasan Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 47.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 636.

<sup>8</sup> Laporan Akhir, *Pekerjaan Pendampingan Masyarakat dalam Rangka Pelaksanaan Iridaya*, Fakultas Geografi dan Dep. Pemukiman Dan Prasarana Wilayah, DIY, hlm. III-I.

Berdasarkan penegasan judul di atas yang dimaksud secara keseluruhan dari UPAYA YAYASAN GHIFARI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN DI LEMBAH CODE YOGYAKARTA adalah penelitian terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Ghifari Yogyakarta dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin pada pendampingan kemasyarakatan untuk merubah dan memandirikan kondisi masyarakat code yang lebih baik.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang tidak asing lagi bagi suatu negara baik itu negara terbelakang maupun berkembang. Masalah kemiskinan bukanlah suatu hal yang asing lagi, apalagi sejak timbulnya krisis yang berkepanjangan dewasa ini. Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Hal ini terbukti dengan kebijaksanaan pemerintah PSP menjelang Repelita III (1979/1980-1983/1984) kebijakan pembangunan yaitu mengurangi jumlah penduduk yang hidup di garis kemiskinan dan melaksanakan jalur pemerintah. Salah satu usaha munculnya organisasi non-pemerintah (Ornop) yang bergerak menangani masalah kemasyarakatan.<sup>9</sup>

Memberdayakan masyarakat miskin merupakan suatu upaya, yang telah dilakukan oleh berbagai pemeluk seperti pemerintah, kaum politisi, cendekiawan maupun LSM-LSM. Di pihak pemerintah sendiri berbagai strategi dan upaya terus dikembangkan untuk segera mengurangi kesenjangan dan membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan. Apa yang sudah kita alami selama ini

---

<sup>9</sup> Onny S. Prijono. *Op. Cit.*, hlm. 99

menyadarkan kita bahwa yang diperlukan masyarakat dari kemiskinan bukan cuma paket bantuan ekonomi atau upaya-upaya yang bersifat “kemurahan hati” saja, tetapi lebih penting dari itu adalah upaya-upaya memberdayakan masyarakat.<sup>10</sup>

Di dalam ajaran Islam sudah seharusnya setiap muslim mempunyai tugas kekhalifahannya di muka bumi baik secara individu maupun secara kelompok dalam lembaga dakwah, lembaga sosial, maupun lembaga yang peduli akan kemajuan umat. Ghifari adalah salah satu contoh dari sebuah lembaga atau yayasan di mana program-programnya adalah memberdayakan masyarakat. Orientasinya lebih kepada pemecahan masalah yaitu : membantu masyarakat mengatasi persoalan-persoalan mereka sendiri. Oleh karena itu masyarakat dihormati hak-hak ketrampilan dan aspirasi mereka dalam mengatasi berbagai persoalan mereka sendiri sehingga seluruh kegiatan merupakan proses pendidikan bagi masyarakat.

Yayasan Ghifari di samping sebagai Yayasan keagamaan (dakwah Islam) juga merupakan Yayasan sosial dan Yayasan kesejahteraan umat yang berhasil mengembangkan dan mengorganisasikan berbagai kegiatan dan program-programnya, sehingga kehadirannya sangat diharapkan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti bermaksud membahas pada pemberdayaan masyarakat miskin meningkat latar belakang Lembah Code merupakan wilayah binaan Ghifari.

---

<sup>10</sup> Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya, dalam Pembangunan Desa*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1996), hlm. 1.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana Pendampingan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Yayasan Ghifari Yogyakarta dalam memberdayakan masyarakat miskin di lembah Code?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Ghifari dalam memberdayakan masyarakat Code melalui pendampingan Kemasyarakatan.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut maka kegunaan penelitian yang diharapkan adalah :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Yayasan Ghifari Yogyakarta dalam usaha memberdayakan masyarakat miskin.
- b. Sebagai informasi dalam rangka menambah pengetahuan bagi mereka yang berminat terhadap usaha pemberdayakan masyarakat miskin.

### **F. Landasan Teori**

#### **1. Kajian Tentang Kemiskinan**

##### **a. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya kesejahteraan semata. Namun, kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensional Rendahnya tingkat hidup yang

sering dijadikan sebagai alat pengukur kemiskinan pada hakikatnya merupakan salah satu mata rantai dari faktor yang menyebabkan lingkaran kemiskinan.<sup>11</sup>

Sedangkan *Loekman Soetrisno* menekankan bahwa terjadi dua pandangan dalam melihat kemiskinan. Pandangan *Petama*, Golongan agrarian populisme, bahwa kemiskinan disebabkan intervensi pemerintah, sehingga solusi pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan kepada si miskin. Pandangan *kedua*, menyatakan bahwa kemiskinan adalah budaya sehingga diperlukan meningkatkan etos kerja dari masyarakat miskin.<sup>12</sup>

Dalam Syariat Islam, ukuran kemiskinan adalah kurang lebih satu nisaf zakat. Maka seseorang sulit memenuhi kebutuhan dasarnya bila dibawah ukuran satu nisaf zakat. Kemiskinan bukan saja persoalan ekonomi tetapi bersifat multidimensional, karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, politik). Karena sifat multidimensional tersebut maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial. Namun untuk memahami seberapa besar kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi seseorang ukurannya menjadi sangat relatif dan kualitatif, sedangkan untuk mengejar seberapa jauh seseorang memerlukan kesejahteraan materi dapat diukur secara kuantitatif dan obyektif seperti

---

<sup>11</sup> Muhammad Mussiyam, M. Farid Wajdi, *Kerentanan dan Jaringan Pengaman Sosial, Rumah Tangga Miskin Kampung Kota Surakarta*, (Surakarta: UMS Press, 2000), hlm. 8.

<sup>12</sup> Awanto Setyo, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Jakarta: Aditya Media, 1986), hlm 38-39.

dalam mengukur kemiskinan absolut yaitu ditunjukkan dengan angka rupiah.

Dalam kemiskinan terkait dalam gejala kemiskinan (*Girt Ellis, G.P.R, 1984*) : *Pertama*, bahwa kemiskinan berdimensi ekonomi/material. Dimensi ini menjelma dalam kebutuhan dasar manusia bersifat material, yaitu papan, pangan, sandang, kesehatan, dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah (kuantitatif). *Kedua*, kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Ukuran bersifat kualitatif. Budaya kemiskinan ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti ketidakberdayaan. Apabila budaya ini tidak dihilangkan maka kemiskinan ekonomi sulit ditanggulangi. *Ketiga*, kemiskinan berdimensi struktural/politik, yang Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak mempunyai kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.<sup>13</sup>

Dimensi kemiskinan pada hakekatnya merupakan gambaran bahwa kemiskinan bukan hanya dalam artian ekonomi, tetapi memperhatikan prioritas itu namun juga mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomi. Ini sejalan pergeseran strategi pembangunan nasional, bahwa yang dikejar bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi,

---

<sup>13</sup> Heru Nugroho. *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan, dalam buku Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. (Jakarta Aditya Media, 1986), hlm 31-32.



tetapi pembangunan kualitas manusia seutuhnya (sosial, budaya, dan politik).<sup>14</sup>

## **b. Bentuk- bentuk Kemiskinan**

Selo Soemardjan, seorang tokoh Sosiologi Indonesia terkenal mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian bentuk-bentuk kemiskinan antara lain adalah sebagai berikut :

### **1. Kemiskinan Struktur**

Adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapat yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

### **2. Kemiskinan Absolut**

Adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. *Sajogya* mengusulkan cara mengukur kemiskinan dengan pendekatan kemiskinan absolut. Cara yang dikembangkan adalah memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Ada 3 golongan orang miskin yaitu: golongan paling miskin yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun 240 kg atau kurang, golongan miskin sekali mempunyai pendapatan per kapita per tahun beras 240-360 kg dan lapisan miskin memiliki pendapatan beras per kapita per tahun lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg. Tetapi

---

<sup>14</sup> Muhammad Musyir, *Op. Cit.*, hlm 10

di Indonesia tolok ukur yang telah dibuat untuk menentukan besarnya jumlah orang miskin adalah batasan tingkat pendapatan per waktu kerja (Rp 30.000,00 per bulan atau lebih rendah) pada tahun 1976/1977. Di samping itu tolok ukur batas minimal jumlah kalori dikonsumsi per orang dalam beras kebutuhan minimal per kapita di desa adalah 320 kg beras dan di kota 420 kg beras per tahunnya.<sup>15</sup>

### 3. Kemiskinan Relatif

Adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Dikaitkan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial, misalnya membandingkan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok sosial tertentu dengan kelompok-kelompok sosial lainnya.<sup>16</sup>

#### c. Beberapa Penyebab Kemiskinan

Kenyataan masih adanya masyarakat yang kurang beruntung atau hidup dalam kemiskinan menandakan bahwa hasil-hasil pembangunan belum dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan hal ini merupakan tantangan yang harus ditangani secara serius dan berkesinambungan. Penundaan dalam mengatasi masalah kemiskinan ini dapat memicu tumbuh dan berkembangnya masalah sosial lain yang lebih kompleks, seperti meningkatnya angka kriminalitas, bertambahnya

---

<sup>15</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, ( Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia, 1984), hlm 15

<sup>16</sup> Heru Nugroho, *Op. Cit.*, hlm 30.

jumlah pengangguran, meningkatnya jumlah wanita tuna susila, berkembangnya permukiman liar dan kumuh, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Penyebab yang paling kategorial dari kemiskinan dibedakan menjadi 3, yaitu :

#### 1. Kesenjangan Fungsi Produksi

Produktivitas adalah fungsi dari faktor tenaga kerja dan kapital (peralatan produksi). Pada masyarakat yang struktur pasar mendekati pasar persaingan sempurna. Produktivitas ditentukan faktor tenaga kerja. Kemudian terjadi transformasi fungsi produktivitas ditentukan oleh kapital (bentuk peralatan produksi). Dan kemudian muncul gelombang lagi dari unit-unit produksi dalam bentuk *human capit* /iptek- intelektual.

Masyarakat yang miskin dalam bentuk faktor tenaga kerja menghasilkan produktivitas yang rendah. Sedangkan masyarakat yang makmur memiliki fungsi produksi tenaga kerja, kapital dan produktivitas yang tinggi mampu menghasilkan faktor tenaga kerja, kapital, intelektual. Ini berarti bahwa perbedaan fungsi produksi mengakibatkan perbedaan produktivitas dan perbedaan produktivitas mengakibatkan perbedaan perolehan hasil yang dinikmati.

#### 2. Keadilan Distribusi Nilai Tambah di Sektor Modern antara Pemasok L (Tenaga kerja), K (Kapital), dan I (Intelektual).

---

<sup>17</sup> J. P. Purwanto, Istiana Hermawati, *Penelitian Evakuatif Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan KUBE di Kab. Bantul-DIY*. (Depsos RI 2000), hlm 5.

Kalau suatu kegiatan telah menghasilkan, masalah yang muncul adalah keadilan dalam pembagian hasil/nilai tambah. Masalah ini timbul di sektor moderen yang memiliki fungsi produksi  $Q = f(L,K)$  dan  $Q = f(L,K,I)$  yaitu keadilan pembagian hasil antara pemasok tenaga kerja, kapital dan intelektual, fungsi faktor produksi  $Q = f(L)$  tidak muncul karena yang substansi adalah tenaga kerja. Masalah ini timbul di dalam unit produksi disebabkan karena pembagian nilai tambah tidak melalui mekanisme pasar secara sempurna. Karena pembagian dilakukan oleh pola manajemen (mekanisme politis yang dominan). Esensi manajemen adalah politik karena bagaimana mengatur orang dan bagaimana menggunakan *power of management*. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang lemah “manajemen power” dan tidak memiliki kekuatan tukar menukar. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan politik.

### 3. Ketidakmerataan Tingkat Moneter/ keuangan di dalam masyarakat

Jika segmen keuangan masyarakat tinggi berarti akses ke bank atau lembaga keuangan lebih mudah, maka formasi kapital di sektor atau segmen tersebut menjadi lebih mudah. Misalkan: dalam suatu pembangunan pabrik mobilisasi dana masyarakat dilakukan melalui mekanisme perbankan. Investor meminjam dana dari bank, dan diinvestasikan untuk membangun pabrik. Ini berarti bahwa kemudahan memperoleh akses dana mengakibatkan kemudahan melakukan investasi dalam bentuk fisik kapitas sebaliknya segmen

masyarakat yang memiliki tingkat moneter/ keuangan yang rendah akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan formasi kapital.<sup>18</sup>

## 2. Kajian Pemberdayaan Masyarakat Miskin

### a. Pengertian Pemberdayaan

Kata Pemberdayaan secara harfiah adalah membuat (seseorang) berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (*empowerment*).

Menurut Hulme dan Turner (1990) bahwa terjadinya proses perubahan sosial yang menghasilkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memiliki pengaruh yang lebih besar dan bersifat individu. Sekaligus koleksi pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuatan yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Di samping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia di mana ia tinggal

Dalam mengkaji pemberdayaan sebagian besar literatur mengakui pentingnya rumah tangga sebagai sumber utama pemberdayaan. Rumah tangga diartikan sebagai kelompok penduduk yang hidup di bawah satu atap, makan di panci yang sama, dan sama-sama terlibat proses pembuatan keputusan sehari-hari.

<sup>18</sup> Bambang Sudibyo, *Subtansi Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Awanto Setyo, (Jakarta: Aditya Media, 1986), hlm. 15-16

Pemberdayaan juga sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Dan juga istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggambarkan keadaan seperti yang diinginkan individu.<sup>19</sup>

#### **b. Pemberdayaan Masyarakat Miskin**

Istilah Pemberdayaan masyarakat sering digunakan sebagai terjemahan dari kata *Empowerment*. Menurut *Pranata dan Vidhyandika* dalam artian sempit arti pemberdayaan berkaitan sistem pembelajaran, sedangkan secara luas berarti aktualisasi diri atau pengembangan diri yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan individu.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian kepustakaan, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberi atau mengalihkan sebagai kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. *Kedua*, menekankan pada proses atau keberdayaan untuk mendorong atau memotivasi individu agar berkemampuan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses.<sup>21</sup>

Dalam panduan IDT, Masyarakat miskin dianggap berdaya bila ia mampu meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonominya melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama

---

<sup>19</sup> A. M. W. Pranaka Vidhyandika Moeljarto, *Op., Cit.*, hlm. 61-62.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 71-72.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57.

dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan, dan partisipasi.

Kemampuan masyarakat dalam “mewujudkan” arah pelaksanaan suatu program ditentukan dengan “*power*” yang dimiliki sehingga pemberdayaan merupakan jiwa partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Memberdayakan masyarakat merupakan satu masalah yang berkaitan dengan hakekat dari *power* (daya). Upaya masyarakat miskin untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan melalui daya yang dimiliki merupakan bagian dari pembangunan proses pembentukan kemandirian, percaya diri. Bentuk dari subjek dan obyek tersebut merupakan relasi yang masih diperbaiki melalui proses pemberdayaan.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun kolektif. Berkumpunya masyarakat miskin dalam suatu kelompok juga dimaksudkan untuk membuat semacam *social network*, misal LSM untuk memperkuat relasi pemberdayaan dengan melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompok tadi. Dalam kelompok tersebut individu untuk mendiskripsikan masalah serta merancang solusi dalam memecahkan masalah tersebut.

Di samping itu butuh peran pendamping untuk mempelancar proses dialog antara individu dan kelompok. Pemberdayaan mementingkan pematihan dari relasi subyek dan obyek. Maka pendamping tidak berfungsi sebagai orang mengajar individu dalam kelompok, tetapi ikut sehingga orang yang belajar dari kelompok dan tidak

berhak mencampuri keputusan dari hasil diskusi.<sup>22</sup>

### 3. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Karena problem kemiskinan bersifat multidimensional, maka strategi penanggulangannya juga harus bersifat multidimensional. Masyarakat miskin dalam mengembangkan diri saja susah apalagi untuk bertahan menegakkan hidup fisiknya pada tarafnya yang subsistem saja bagi keluarga miskin hampir-hampir merupakan hal yang mustahil bila tidak ditopang oleh jaringan sosial di lingkungan sekitarnya terutama kerabat dan tetangga, kian miskin dan kian dipermiskin hidup seseorang atau sebuah keluarga, akan kian rendah dan menurun pulalah tingkat keberdayaan orang atau keluarga itu dalam mengembangkan taraf hidupnya.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah kebijakan yang memberikan ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan. Kesempatan yang produktif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, dan tidak untuk mendesak dan menekan mereka ke pinggir/keposisi ketergantungan.

Menurut *Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993* ada beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam memberdayakan lapisan masyarakat miskin. *Pertama*, pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin bila berhadapan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 132-139



dengan struktur sosial politis. Langkah kongkrit meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya. *Kedua*, memutuskan hubungan-hubungan bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin, artinya melakukan reorganisasi dalam meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidup. *Ketiga*, tanamkan rasa kesamaan dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan takdir tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial. *Keempat*, merealisasikan perumusan pembangunan masyarakat miskin secara penuh. *Kelima*, perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Perlunya perubahan nilai-nilai positif kepada lapisan masyarakat seperti perencanaan hidup optimis, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja. *Keenam*, diperlukan redistribusi infrastruktur pembangunan sehingga lebih merata. Artinya akses ekonomi sangat diperlukan dan dipenuhi karena bersangkutan dengan akses ke bidang lainnya. Apabila langkah itu dapat dilaksanakan secara terpadu maka kemiskinan dapat ditanggulangi dan ketimpangan akan surut pula.<sup>23</sup>

#### **4. Kajian Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam perkembangannya LSM berperan serta dalam upaya memberdayakan masyarakat di Indonesia. LSM merupakan salah satu lembaga yang bekerja di bidang pengembangan masyarakat (*Community Development*) dan dibentuk oleh sejumlah anggota masyarakat. Namun pada hakekatnya LSM adalah agen pembangunan (*Development agent*) yang

---

<sup>23</sup> Heru Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 34-35

merupakan kelompok swadaya dari anggotanya dengan kegiatan yang bersifat sektoral.

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) muncul pada awal dasawarsa 1980-an, yang merupakan pengganti dari istilah Non Pemerintah/*Non Government Organization/NGO/Voluntary Organizations*.

Pada umumnya LSM diartikan sebagai organisasi yang pembentukan dan keanggotaannya berasal dari prakarsa dan unsur-unsur pemerintah. Kemunculannya bersumber dari inisiatif individual dan keanggotaannya bersifat sukarela serta berasal dari kalangan masyarakat. Tetapi tidak luput menimbulkan kerumitan terutama untuk membedakan LSM dengan organisasi kemasyarakatan lainnya ( Human Development Report, 1993 : 84).

Adapun *United Nations For Development Program* mengartikan *Non Governmental Organization* atau NGO sebagai organisasi demokrasi yang mewakili kepentingan anggota-anggotanya dan bertanggung jawab kepada mereka sendiri. Organisasi ini dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang sudah saling mengenal, memiliki pengalaman yang sama, dan keberadaannya tidak tergantung pada inisiatif atau bantuan dari luar. Ukurannya kecil, bersifat lokal dan secara organisasi adalah “longgar”, yang karya dan aktivitasnya banyak terfokus pada isu-isu masyarakat di luar kepentingan staf dan anggotanya.<sup>24</sup>

Kekuatan LSM sebenarnya terletak pada pembelaan masyarakat yang dilayani. Mereka menginginkan demokratisasi, dihormatinya hak-hak

---

<sup>24</sup> A. M. W. Pranaka Vidhyanadika Moeljarto, *Op., Cit.*, hlm. 65.

asasi manusia dan keikutsertaan rakyat dalam menentukan arah pelaksanaannya, yaitu kegiatan pada makro-politik dengan menjadi semacam penggerak demokrasi atau menyuarakan hak-hak asasi manusia, membangun partisipasi rakyat pada tingkat lokal, dan mengambil jalan tengah dengan membangun basis demokrasi dan partisipasi pada tingkat lokal sambil memperjuangkan kepentingan mereka lewat persuasi dan perundingan kebijaksanaan nasional atau membentuk pendapat lewat berbagai media.<sup>25</sup>

Ada beberapa strategi program pengembangan dari LSM, yang tercermin dalam lima generasi. Generasi pertama mengutamakan *relief and welfare*,<sup>26</sup> yaitu dengan berusaha untuk segera memenuhi kekurangan atau kebutuhan tertentu yang dialami individu atau keluarga (kebutuhan makan, kesehatan, dan pendidikan), dan uluran bantuan kemanusiaan yang diberikan juga pada saat terjadi bencana alam atau musibah lainnya.

Generasi kedua, memutuskan pada *community development*, meliputi pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna dan pembangunan infrastruktur. Mereka menyadari untuk menyelesaikan persoalan masyarakat bawah dengan pendekatan bawah-atas (*bottom-up approach*), karena itulah pengembangan sumber daya manusia, kemandirian dan keswadaya masyarakat mulai diperhatikan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Aswab Mahasin, "Membangun Civil Society Dari Kancan Yang Rentan : Sebuah Pengantar " dalam buku Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000, Rustam Ibrahim (ed), (Jakarta: CESDA Dan LP3ES, 1997), hlm. 5.

<sup>26</sup> Onny S. dalam Onny S. dan A. M. W. Pranaka, *Op. Cit.*, hlm 99

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 100

Generasi ketiga, mulai terlihat dalam *sustainable systems development*, mulai mempermasalahkan dampak-dampak pembangunan dan cenderung melihat jalur tingkah regional, nasional, dan internasional. Mereka mulai menyadari bahwa tingkat lokal merupakan perpanjangan tangan dari keadaan nasional atau global sehingga berusaha mempengaruhi kebijaksanaan perumusan pembangunan dan mengharap perubahan pada tingkat regional maupun nasional.<sup>28</sup>

Generasi keempat, menurut Korten sebagai fasilitator gerakan masyarakat. Cara LSM adalah dengan membantu masyarakat mengorganisasi diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka. LSM juga mendapat tambahan sumber daya dari luar dan gerakan ini berusaha agar ada transformasi struktur sosial dalam masyarakat dan di setiap sektor pembangunan.<sup>29</sup>

Gerakan kelima, yaitu gerakan pada pemberdayaan rakyat (*Empowering People*). Gerakan perjuangan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terbuka, dan untuk memperoleh pangakuan pemerintah terhadap arti penting inisiatif lokal. Jaringan kerja (*networking*) pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional menjadi suatu kebutuhan.<sup>30</sup>

Kehidupan LSM dipahami dikenal istilah *outsider* dan *insider* bagi para pelakunya. Sebagai *outsider* karena mereka berasal dari golongan menengah dalam kategori *grassroot*. Pemahaman tersebut bersifat positif

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>29</sup> David C. Korten, "*LSM Generasi Keempat : Fasilitator Gerakan Masyarakat* ", Prisma No 4, XVII, 1988, hlm. 31.

<sup>30</sup> Onny S. dan A. M. W. Pranaka, *Op. Cit.*, hlm. 102.

apabila dibarengi dengan sikap menempatkan diri sebagai fasilitator (pendamping/penyerta) dan katalisator (pelancar) dalam proses pengembangan masyarakat dan bersifat negatif apabila menempatkan diri sebagai pemimpin dari masyarakat. Mereka diterima sebagai *insider* karena berhasil menumbuhkan kepercayaan dari kelompok yang didampinginya. Kepercayaan adalah modal utama bagi LSM sebagai kelompok menengah dalam mendampingi masyarakat.<sup>31</sup>

Strategi yang diambil dalam suatu program pemberdayaan masyarakat miskin akan menentukan keberhasilan dalam melaksanakan program dilapangan. Dalam sebuah program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin perlu adanya strategi yang efektif dan tepat karena berhasil tidaknya suatu program tergantung pada ketepatan dan keefektifan strategi yang dipilih.

Banyak pemikat dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak menyadari bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka tidak tenteram dan nyaman terhadap konsep yang ditawarkan oleh pemberdayaan dan akibatnya menurut Ginanjar lebih lanjut terdapat beberapa bias dalam pemberdayaan sebagai suatu paradigma baru pembangunan tersebut. Bias-bias tersebut adalah :

1. Kecenderungan berfikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan tidaklah penting untuk dari dimensi moralnya, dimensi material lebih

---

<sup>31</sup> Kartjono, " *Demokratisasi Di Tingkat Grassroots* ", Prisma, No. 6, XVII, hlm. 5

penting dari dimensi kelembagaannya, dan dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.

---

2. Anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna sehingga kebijakan-kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang memperhatikan kondisi nyata dan hidup di masyarakat.
3. Anggapan bahwa pembangunan masyarakat di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material dari pada ketrampilan teknis dan managerial, sehingga terjadi pemborosan sumber daya dan managerial dan makin tertinggalnya masyarakat lapisan bawah.
4. Anggapan bahwa teknologi yang diperlukan dari atas selalu lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat, sehingga terlalu mamaksa dan menyamarkan teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan perubahan mungkin akan lebih efektif.
5. Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang dikalangan rakyat cenderung tidak efektif bahwa menghambat proses pembangunan.
6. Anggapan bahwa masyarakat lapisan bawah tidak tahu apa yang yang diperlukannya ataupun memperbaiki nasibnya. Mereka dituntut, diberi petunjuk dan tidak dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dan melibatkan diri masyarakat, sehingga sering salah alamat, tidak memecahkan masalah bahkan merugikan masyarakat.
7. Anggapan bahwa orang miskin menjadi miskin dikarenakan bodoh dan malas arah penanganannya cenderung bersifat paternalistik seperti

memperlakukan orang malas dan bodoh, bukannya memberikan kepercayaan. Permasalahan kemiskinan lebih dipandang sebagai nuansa sosial (*charity*) dan bukan sebagai usaha penguatan ekonomi.

8. Ukuran efesiensi pembangunan salah diterapkan dan diarahkan pada pertumbuhan yang segar. Konsep pemberdayaan lebih bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial swadaya dari pembangunan dan potensi-potensi yang ada pada masyarakat sebagai kekuatan pembangunan.
9. Anggapan bahwa sektor pertanian dari pedesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif dan memiliki masa investasi panjang, sehingga kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran pada sektor tersebut. Bermitra dengan petani dan usaha-usaha kecil dipandang tidak menguntungkan dan memiliki resiko tinggi sehingga melibatkan prasangka dan menghambat upaya pemberdayaan pada sektor tersebut.
10. Adanya ketidakseimbangan dalam akses pada sumber dana, kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan dan industri yang banyak disubsidi dan diproteksi, sehingga mendorong adanya urbanisasi (lihat Ginanjar Kartasasmita 1996: 144-149).

Ada sebuah konsep pendampingan sebagai ~~model~~ pendekatan dalam memberdayakan masyarakat oleh LSM dan ~~model pendekatan~~ pendampingan ini digunakan untuk menjalankan kegiatannya.

Kata pendampingan merupakan suatu istilah yang telah berkembang di kalangan dunia LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia.

Istilah pendampingan, berasal dari kata “damping”. Jadi antara LSM dan masyarakat sejajar, tidak ada yang menjadi “atasan dan bawahan”. LSM berperan melakukan pendampingan dalam arti bahwa LSM berada dipihak masyarakat, menemani atau mitra dengan masyarakat. Dan orang yang melakukan kegiatan pendampingan pada umumnya disebut pendamping.<sup>32</sup> Maka prinsip dasar dari pendampingan adalah egaliter atau kesejajaran kedudukan. Dengan demikian, watak hubungan antara LSM dan komunitas (masyarakat) adalah kemitraan (*partnership*). Untuk lebih mudah, hubungan LSM dengan komunitas dalam pendampingan adalah “duduk sama rendah; berdiri sama tinggi”.

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya masyarakat agar mampu membela diri sendiri. Hal yang penting adalah menumbuhkan kesadaran. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari tujuan di atas adalah memperkuat atau memberdayakan sehingga mereka berkembang menjadi masyarakat yang sanggup mempertahankan harga dirinya demi keadilan dan hak-hak asasi yang fundamental.<sup>33</sup>

Dalam pendampingan terdapat dua model pendampingan, yaitu CD (*Community Development*) atau Pengembangan Komunitas dan CO (*Community Organization*) atau Pengorganisasian Komunitas.

---

<sup>32</sup> Erom Aritnang, Hegel Terome, Syaiful Bahari, *Pendamping Komunitas Pedesaan*, (Jakarta, sekertaris Bina Desa/in DHRRA, 2001), hlm. 7

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 18.



### 1. CD (*Community Development*).

Pengembangan Komunitas adalah pengembangan yang lebih mengutamakan sifat fisik masyarakat. CD mengutamakan pembangunan dan perbaikan atau pembuatan sarana-sarana sosial ekonomi masyarakat. Sebagai contoh : pelatihan gizi, penyuluhan KB, pembangunan jalan raya, bantuan peralatan dan sebagainya.

Dengan demikian peningkatan penguatan keterampilan dan penggalan potensi-potensi sosial ekonomi yang telah ada lebih diutamakan untuk mensukseskan target yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah atau LSM. CD biasanya berjangka panjang, pendek, fiskal dan tidak berkelanjutan.

### 2. CO (*Community Organization*)

Pengembangan Komunitas (CO) adalah pengembangan yang lebih mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalan potensi pengetahuan komunitas lokal. *Community Organization* mengutamakan pembangunan komunitas berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis.

Usulan komunitas merupakan sumber gagasan yang harus ditindaklanjuti secara kritis, sehingga partisipasi rakyat dalam merencanakan, membuat keputusan dan melaksanakan program merupakan tonggak yang sangat penting.

*Community Organization* bergerak dengan cara menggabungkan masyarakat ke dalam suatu organisasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan komunitas. Suara dan kepentingan rakyat lebih utama daripada

kepentingan kaum elit. Titik tekan pembangunan *Community Organization* adalah pengembangan kesadaran komunitas sehingga mampu mengelola potensi sumber daya manusia mereka.

Tujuan pokok *Community Organization* adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berkemanusiaan (*Civil Society*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, adil, transparan, berkesejahteraan ekonomi, politik, dan budaya.<sup>34</sup>

Tahap-tahap dalam pendampingan yang dilakukan sebagai pendamping :

#### 1. Integrasi Diri dengan Komunitas

Integrasi atau penyatuan diri, adalah proses pembangunan hubungan dengan komunitas yang dilakukan secara terus menerus dalam upaya menyelami kehidupan mereka dengan cara tinggal atau hidup bersama mereka dan merasakan pengalaman yang sama. Selama integrasi, pendamping di dalam komunitas menggali harapan-harapan, aspirasi, kesulitan-kesulitan hidup untuk saling menegakkan rasa hormat, kepercayaan dan kerja sama yang sejati di antara mereka.

#### 2. Investigasi Sosial dan Studi Komunitas

Investigasi sosial adalah belajar dan menganalisis secara sistematis berbagai struktur dan kekuatan komunitas yang menyangkut masalah ekonomi, politik, dan sosial budaya. Investigasi sosial akan menghasilkan potret komunitas dengan cara memadukan, memeriksa dan membandingkan data yang dikumpulkan untuk mencitrakan situasi komunitas secara lebih

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 9-11.

jelas. Studi sosial adalah fase penelitian atas perkembangan komunitas yang dilakukan selama proses pendampingan dan dilaksanakan dalam jangka waktu lama.

### 3. Perencanaan Tentatif

Perencanaan tentatif adalah proses indentifikasi tujuan dan menterjemahkannya menjadi kegiatan-kegiatan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka memecahkan berbagai masalah di dalam komunitas. Perencanaan ini disusun oleh kelompok komunitas, tugas pendamping ialah menciptakan proses perencanaan tersebut dapat berjalan.

### 4. Pembentukan Kelompok Inti

Pembentukan kelompok inti ini merupakan proses memadukan pemimpin-pemimpin sejati di antara pemimpin komunitas yang teridentifikasi sepanjang integrasi dan tahap-tahap investigasi sosial. Pemimpin komunitas sejati ialah mereka yang dijadikan suri tauladan karena sikap dan tindakannya selalu membela kepentingan komunitas.

### 5. Pengorganisasian Komunitas

Pengorganisasian komunitas artinya, terjun ke dalam komunitas guna memotivasi rakyat khususnya yang mengalami marginalisasi dan miskin melalui kelompok diskusi-diskusi informal dengan menggelar isu-isu umum bersama atau terasakan langsung oleh komunitas.

### 6. Pertemuan Komunitas

Pertemuan komunitas adalah pertemuan atau rapat-rapat di dalam komunitas yang merupakan tindak lanjut dari proses pendampingan di mana

pendamping dapat mengumpulkan anggota komunitas sebanyak mungkin untuk berdiskusi secara resmi tentang isu-isu atau masalah yang ada di komunitas tersebut dan juga untuk melaksanakan aksi bersama.

#### 7. Bermain Peran

Bermain peran adalah kegiatan pelatihan dengan bentuk permainan peran yang dilakukan komunitas dalam kaitan negoisasi atau dialog dalam aksi, antara pemimpin organisasi beserta rakyat dengan pihak penguasa. Bermain peran ini dapat membangun dan merangsang pembahasan para peserta pelatihan dan juga dapat memberikan pengertian bahwa dalam situasi nyata permasalahan peran yang dihadapi, kemampuan memainkan peran, bahasa dan gerak badan mempunyai pengalaman terhadap empati para peserta dalam mendukung permasalahan untuk mencapai pemecahan masalah.

#### 8. Mobilisasi

Mobilisasi adalah aksi menyatakan komunitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai isu dan kebutuhan mereka. Bagi pendamping, agar organisasi yang berbasis isu aktual dapat berbentuk maka diperlukan dialog atau negoisasi yang dikomunikasikan dengan taktik-taktik aksi tertentu.

#### 9. Evaluasi

Evaluasi adalah proses yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan hal-hal yang sudah dihasilkan, yang gagal dilaksanakan dan yang harus dilaksanakan. Evaluasi pada dasarnya adalah suatu proses untuk

memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dalam menyelidiki aksi-aksi.

#### 10. Refleksi

Refleksi adalah belajar mengidentifikasi dan menganalisis ulang hasil- hasil yang sudah dilaksanakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan berbagai perasaan orang lain.

#### 11. Formalisasi Organisasi Berbasis Komunitas

Ada saatnya proses pengorganisasian diformalkan bahkan mobilisasi komunitas harus dilakukan khususnya selama pertemuan atau rapat. Pertemuan secara sementara dapat memudahkan formalisasi organisasi sampai adanya evaluasi dari refleksi.

#### 12. Konsolidasi dan Ekspansi.

Konsolidasi dan ekspansi merupakan tahap terpenting dalam pengorganisasian yang selanjutnya merupakan proses pendalaman dan perluasan organisasi. Konsolidasi dan ekspansi merupakan proses watak termaju pengorganisasian. Konsolidasi meliputi semua wilayah pengorganisasian yang terlihat di dalam dan luarnya. Konsolidasi akan memperkuat dan memperluas pengaruh organisasi.<sup>35</sup>

Pendampingan komunitas atau jamaah merupakan proses interaksi dalam bentuk ikatan pertemuan atau perlawanan pendampingan (Subyek 1) dengan komunitas dampingan (Subyek 2) untuk saling berdialog dan berhubungan erat dalam rangka memecahkan persoalan kehidupan bersama untuk mengubah realitas yang meminggirkan mereka.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 61-77.

Makna lain pendampingan komunitas atau jamaah adalah proses pembangunan organisasi rakyat yang dilakukan secara partisipasi tranformalitas, sistematis dan terus menerus melalui pengorganisasian dan peningkatan kekuatan sumber daya agar mereka mampu mengungkapkan persoalan-persoalan dan keprihatinan dirinya sendiri guna mengubah kondisi yang mereka alami. Dari hubungan itu terbangun proses penumbuhan kesadaran kritis, kreatif dan berani di kalangan anggota jamaah atau komunitas untuk melawan realitas yang menimpa mereka. Pendampingan bias saja berasal dari dalam komunitas atau dari luar komunitas itu sendiri, asal cara pandang dan sikapnya sesuai dengan prinsip-prinsip pendampingan.

Prinsip-prinsip pendampingan adalah pandangan dan sikap pendamping dalam melihat realitas komunitas atau jamaah dan bagaimana dia bekerja untuk menghadapinya, prinsip-prinsip pendamping yang dimaksud adalah :

#### 1. Pengorganisasian Terpadu

Pada proses pendampingan perlu diperhatikan segi sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan sebagai hal yang mendasar dalam suatu komunitas atau jamaah. Oleh sebab itu, tiap pendamping perlu memperhatikan segi-segi tersebut dalam komunitas yang didampingi dan jangan pernah memisahkan segi yang satu dengan lainnya, karena akan menjerumuskan pendamping ke dalam pilihan yang tidak obyektif.

Pilihan-pilihan ini hendaknya berdasarkan pada kebutuhan komunitas itu sendiri, jangan ditentukan oleh pihak luar. Keputusan yang

diambil hendaknya berdasarkan atas pemahaman yang mendalam mengenai segi-segi tersebut, aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan dan hendaknya ditangani secara integratif dan dengan perspektif yang seimbang.

## 2. Pendampingan dengan Struktur Penindasan

Pendampingan komunitas atau jamaah patut mewaspadaai adanya penindasan kelas, agama, ras, etnis, dan gender. Proses pendampingan harus menyadari bentuk-bentuk dan cara penindasan ini bekerja, baik melalui media periklanan, pendidikan, bahasa, sistem ekonomi, tatanan organisasi dan sebagainya. Pendampingan dalam proses pengorganisasiannya harus menyadari bahwa dalam proses dan pengembangan komunitas yang dilakukan olehnya bisa mengekalkan kembali stuktur penindasan di dalam komunitas melalui pertemuan-pertemuan, jadwal, kebijakan, dan kegiatan lainnya.

## 3. Pemberdayaan

Inti pemberdayaan adalah membebaskan rakyat atau komunitas atau jamaah dari penindasan struktur seperti penindasan kelas, gender, agama, etnis, bahasa dan pendidikan yang mungkin dilakukan oleh elite komunitas.

Dengan demikian, kegiatan ini merupakan perubahan radikal yang menggantikan struktur penindasan yang mapan.

## 4. HAM

HAM menjadi prinsip penting dalam pendampingan komunitas. Kerja-kerja pendampingan komunitas idealnya harus sesuai dengan HAM dan tidak boleh bertentangan dengan persepsi HAM. Misalnya hak untuk

hidup layak, pendidikan, politik, berpartisipasi dalam kebudayaan, menentukan nasib sendiri, dan lainnya.

#### 5. Kemandirian

Pengembangan ekonomi di tingkat komunitas atau jamaah perlu dipertimbangkan sumber-sumber daya alam yang kian terbatas. Prinsip kemandirian ialah sikap yang terfokus pada apa yang dilakukan terhadap sumber-sumber lokal. Kemandirian akan menempatkan suatu komunitas atau jamaah pada posisi yang lebih baik.

#### 6. Berkelanjutan.

Tiap langkah pengembangan komunitas berkaitan dengan kerangka kegiatan yang berkelanjutan. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan pemakaian SDA yang tidak dapat diperbarui.

#### 7. Pembangunan Komunitas.

Tujuan pendampingan akhirnya akan bermuara pada pembangunan komunitas. Pembangunan komunitas mencakup usaha memperkuat interaksi sosial, komunitas organisasi, meningkatkan dialog sejati, dan aksi-aksi ekonomi, politik, maupun budaya. Pendampingan mesti merencanakan dan mengupayakan kegiatan-kegiatan yang dapat menyatukan mereka dalam suatu kepentingan bersama seperti temu komunitas.

#### 8. Komunitas Organik.

Komunitas yang hendak dibangun adalah komunitas organik yang usaha pendampingan memperhatikan dan menilai komunitas menurut



karakter serta mengikuti dan mengembangkannya sesuai dengan kondisi lokal.

#### 9. Kepemilikan Komunitas.

Kepemilikan Komunitas mengacu pada prinsip kebersamaan dalam arti komunitas terlibat aktif mengawasi berbagai kegiatan yang ada dilingkungannya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pengambilan keputusan, dan lainnya.

#### 10. Tahap Kekerasan.

Komunitas alternatif menentang segala bentuk kekerasan tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan struktural yaitu kekerasan yang dipaksakan melalui lembaga-lembaga yang ada di komunitas misal : adanya seksisme, dan lainnya.

#### 11. Partisipasi.

Memberi kesempatan pada tiap orang untuk terlibat aktif dalam kegiatan komunitas. Semakin aktif anggota komunitas mengambil bagian, maka tujuan pendampingan akan semakin tergapai.<sup>36</sup>

Tujuan pendampingan dalam komunitas adalah ;

##### 1. Penguatan Rakyat.

Pendampingan komunitas ditujukan untuk membangun keluarga yang efektif melalui proses pendampingan, rakyat dapat belajar mengenai kelemahannya dan mengembangkan kemampuannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang mereka akan hadapi. Memahami realitas struktur yang menindas mereka dan sadar akan posisinya dalam realitas tersebut.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 45-49.

Bila kesadaran itu tumbuh maka memperbaiki kualitas kehidupan mereka melalui aksi bersama menembus rintangan struktural.

## 2. Pembangunan Organisasi.

Pendampingan komunitas ditujukan untuk membangun organisasi kekuatan rakyat tidak akan efektif dan tahan lama bila tidak mawadahi dalam satu organisasi yang sakid yang berfungsi untuk melayani kebutuhan dan menampung aspirasi anggota komunitas.

## 3. Perbaikan Kualitas Hidup.

Dari komunitas berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup yang dengan cara melakukan perbaikan dibidang ekonomi, agama, dan lainnya.<sup>37</sup>

# G. Metode Penelitian

## 1. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

Penelitian ini yang menjadi subyek adalah informan tempat memperoleh keterangan atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

- a. Pengurus Yayasan Ghifari Yogyakarta.
- b. Pihak-pihak terkait seperti pendamping pada masyarakat Code Yogyakarta yang dapat membantu penelitian dalam mengumpulkan data.
- c. Masyarakat code yang menjadi binaan Yayasan Ghifari Yogyakarta.

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Yayasan Ghifari dalam memberdayakan masyarakat

---

<sup>37</sup> Lihat Skripsi Agus Ronny. MB. *Pendampingan Komunitas Ibu-ibu Jalanan Melalui Pengembangan Ekonomi Keluarga oleh Yayasan Indriya-Nati*, (Yogyakarta, 2003). hlm 30.

melalui pendampingan Kemasyarakatan pada masyarakat binaan di lembah Code Yogyakarta.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dipakai untuk memperoleh data yang lengkap obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

### a. Metode *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud untuk menggali informasi tertentu. Tujuan adanya wawancara adalah untuk mengambil data yang berkaitan dengan sejarah Yayasan tentang pendampingan dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh pewawancara adalah wawancara pembicaraan informasi dan wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara.<sup>38</sup> Jenis wawancara pertama, hubungan antara pewawancara dengan yang diwawancarai berjalan seperti pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan terkadang yang diwawancarai tidak sadar bahwa dirinya sedang diwawancarai. Jenis wawancara kedua, berisi tentang garis besar proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup semuanya. Dalam wawancara jenis ini diperuntukkan untuk semua subyek penelitian.

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII ; (Bandung: PT. Remaja Rosda Karva, 2000), hlm. 135-136.

#### b. Metode Observasi

Metode Observasi digunakan untuk mengamati, memonitor, menyakinkan, serta memperoleh data-data dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Yayasan Ghifari yang tidak bisa didapat melalui metode yang lainnya, seperti tingkah laku antara pendamping dan yang didampingi, serta proses berjalannya kegiatan yang dijadikan obyek penelitian. Penyusun mengamati secara langsung (tanpa alat bantu) terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengenal peristiwa atau gejala secara langsung yang penting dalam suatu penyelidikan.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan suatu data yang telah ada dan biasanya berupa tulisan, catatan, atau benda lain.<sup>39</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip berupa catatan program-program dan kegiatan-kegiatan Yayasan Ghifari dalam memberdayakan masyarakat miskin di lembah Code Yogyakarta, artikel-artikel tentang Yayasan Ghifari serta program-program tertulis lainnya yang relevan dengan obyek penelitian.

### 3. Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses akhir dari penelitian setelah masalah penelitian dirumuskan dapat dikumpulkan dan diklarifikasikan maka

---

<sup>39</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 232

langkah selanjutnya adalah menganalisa dan menginterpretasikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tetapi sebelum proses analisis data berlangsung terlebih dahulu dilakukan *checking* dan *triangulasi* terhadap sumber data dengan tujuan agar data dipercaya keabsahannya. *Checking* data untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang didapat dengan cara membaca kembali catatan-catatan jawaban untuk didengarkan oleh sumber data. Triangulasi terhadap sumber data dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>40</sup>

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari lapangan, maka penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu pertama, mengadakan klasifikasi data, kedua memaparkan dan mendiskripsikan data-data yang ada dan ketiga menginterpretasikan data yang pernah atau diperoleh dalam bentuk kalimat.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Lexy. J. Moleong. *Op. Cit.*, hlm 178.

<sup>41</sup> Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta Rineka Cipta, 1992), hlm. 209.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Strategi Partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat miskin di lembah Code diperlukannya kemandirian untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam kegiatan yang telah dilaksanakan atau direncana.

Aspek dalam pemberdayaan masyarakat memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk mengakses peluang secara potensial untuk menaikkan derajat pendidikan, kesadaran, wawasan hidup yang wajar dan bermartabat. Kegiatan dan proses pendampingan pada masyarakat di lembah Code melalui aspek strategi yang telah dilakukan pada proses pemberdayaan ini bertujuan untuk mencapai kemandirian pada masyarakat dampingan melalui kebersamaan agar tercapai kehidupan masyarakat yang ideal. Suasana kelompok ini memberikan kesan sama bagi semua anggota, baik antara pendampingan maupun anggota kelompok pada masyarakat di lembah Code ini, agar dalam kegiatan pelaksanaan pada kelompok dapat memberikan kepuasan yang baik atas pelaksanaan kegiatan kelompok tersebut. Evaluasi kepada kelompok ini juga memberikan masukan yang baik terhadap obyek kegiatan yang telah dijalankan atau dilaksanakan.

2. Kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat miskin di lembah Code melalui beberapa pendekatan yang digunakan sebagai metode. Pendekatan Pendidikan ditempuh melalui pengajian rutin keagamaan (siraman rohani),

beasiswa untuk anak-anak, TPA. Kegiatan tersebut diberikan kepada masyarakat Code yang menjadi dampingan Yayasan Ghifari. Pendekatan Ekonomi Produktif melalui pemberian modal produktif untuk usaha bersama melalui simpan pinjam, koperasi usaha bersama. Untuk pendekatan keorganisasian guna menumbuhkan kemandirian dan semangat hidup seperti halnya pelatihan-pelatihan, kursus. Upaya Yayasan ghifari dalam memberdayakan masyarakat miskin di Code melalui pendampingan yang merupakan suatu usaha untuk mengajak, menggerakkan, mengarahkan, sekaligus memberikan peningkatan hidup yang layak.

#### **B. Saran-saran.**

1. Mengamati pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Ghifari melalui pendampingan agar lebih kritis dan peduli dalam melihat fenomena masyarakat yang termarginalkan oleh struktur dan terjepit oleh kemiskinan yang timbul dan ketidakberdayaan masyarakat miskin.
2. Jangan menganggap masyarakat miskin terbentuk karena malas bekerja, justru mereka bekerja dengan tekun, ulet dan gigih, karena kalau tidak seperti itu mau makan apa?. Sebagai pengembang masyarakat "*social worker*" harus peduli dan mendampingi serta berusaha memperbaiki kehidupan mereka.
3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin sudah berjalan dengan baik, ada baiknya untuk lebih ditingkatkan pada pendekatan yang lainnya agar hasilnya sama rata karena hanya dipentingkan salah satunya.



### **C. Kata Penutup.**

Alhamdulillah, di akhir tulisan ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna tetapi dapat terselesaikan dengan segala suka, dan duka. Oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai masukan.

Proses penyusunan skripsi ini juga menjadi proses bagi penyusun dalam memahami hakekat dari proses pendampingan pada masyarakat atau pendampingan yang lainnya dalam suatu kelompok.

Kepada semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, penyusun sangat berterima kasih semoga bermanfaat. Akhirnya hanya keridhaan Allah yang penyusun mohon, semoga Rahman dan Rohim dilimpahkan kepada seluruh umatnya. Amien.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ihsani. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981.
- Agus Ronny. MB. *Pendampingan Komunitas Ibu-ibu Jalanan Melalui Pengembangan Ekonomi Keluarga Oleh Yayasan Indriya-Nati*. Karya Tidak Diterbitkan. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.
- A. M. W. Pranaka Vidhyanadika Moeljarto. *Pemberdayaan (Empowerment)*. Jakarta: CSIS. 1996.
- Arie Kusumatuti Maria Suhardiadi. *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan UURI No. 16 Tahun 2000*. Indonesia Legal Center Publising. 2003.
- Aswab Mahasin. *Membangun Civil Society Dari Kancan Yang Rentan: Sebuah Pengantar Dalam Buku Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000*. Jakarta: CESDA Dan LP3ES. 1997.
- Awanto Setyo. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Jakarta: Aditya Media. 1986.
- Bambang Sudibyo. *Substansi Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Awanto Setyo. Jakarta: Aditya Media. 1986.
- Bagong Suyanto. *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media. 1966.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: PT. Mahkota. 1989.
- Erom Aritonong, Hegel Terome, Syaiful Bahari. *Pendampingan, Komunitas Pedesaan*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa/in DHRRA. 2001.
- Hasan Sadily. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.
- Heru Nugroho. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan, dalam buku Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Awanto Setyo. Jakarta: Aditya Media. 1986.
- J. P. Purwanto, Istiana Hermawati. *Penelitian Evakualitif Tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan KUBE di Kab. Bantul DIY*. Depsos RI. 2000.
- Koentjoraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia. 1989.

Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Masyarakat Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2000.

Muhammad Mussiyam. M. Farid Wajdi. *Kerentanan dan Jaringan Pengaman sosial, Rumah Tangga Miskin Kampung Kota Surakarta*. Surakarta: UMS Press. 2000.

Onny S. Prijono. *Pemberdayaan Konsep dan Implementasi*. Jakarta: CSIS. 1996.

Parsudi Suparlan. *Kemiskinan di perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan Yayasan Obor Indonesia. 1984.

Simanhadi. W. *Masyarakat Tengger*. Yogyakarta: Kanisius. 1994.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.

W. J. S. Poerwadarminto. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.

### **Majalah**

David C.Korten, *LSM Generasi Keempat: Fasilitator Gerakan Masyarakat*, Prisma No 4, XVII, 1988.

Kartjono, *Demokratisasi Di Tingkat Grassroots*, Prisma No.6.XVII, 1988.

### **Makalah**

Laporan Akhir. *Pekerjaan Pendampingan Masyarakat dalam Rangka Pelaksanaan Tridaya*. Fakultas Geografi dan Pemukiman dan Prasarana Wilayah DIY.